

Kepemimpinan Pastoral Kristiani dalam Pespektif Prinsip-prinsip Ajaran Sosial Gereja

Petrus Sina^a, Jean Loustar Jewadut^b, Gergorius Lawe Weking^c, Melgy Setya Permana^d, Herman Jewarut^e

^{a,b,c,d,e} Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere

email: pedrosinadasilva@gmail.com, jewadutj@gmail.com, george97weking@gmail.com, melgysetyapermana@gmail.com, jewarutherman@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah artikel:

Dikirim 22 September 2024

Direvisi 21 Mei 2025

Diterima 23 Juni 2025

Terbit 30 Juni 2025

Kata kunci:

Kepemimpinan Pastoral
Gereja

Prinsip-prinsip
Ajaran Sosial Gereja

ABSTRAK

Artikel ini memberikan pendasaran teologis dengan berinspirasi pada gagasan tentang prinsip-prinsip Ajaran Sosial Gereja (ASG) untuk praksis kepemimpinan pastoral Kristiani. Penulis akan mengangkat sejumlah pesan penting dalam prinsip-prinsip ASG untuk direlevansikan dengan praksis kepemimpinan pastoral Kristiani. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kepustakaan, artikel ini menjelaskan bahwa dalam perspektif prinsip-prinsip ASG, kepemimpinan pastoral menekankan prinsip partisipasi semua umat beriman dalam pelaksanaan karya pastoral. Seorang pemimpin, dalam hal ini kaum klerus, mesti mampu membangun komunikasi yang harmonis dengan semua umat beriman teristimewa dalam penetapan kegiatan-kegiatan pastoral. Selain itu, kepemimpinan pastoral dijalankan dengan keterlibatan aktif pemimpin pastoral dalam situasi konkret kehidupan umat sehingga kebijakan pastoral yang ditetapkan kontekstual dengan situasi umat dan akhirnya menawarkan kepemimpinan pastoral yang berdiakonia sebagai wujud kepedulian Gereja terhadap realitas sosial. Dengan demikian, kepemimpinan pastoral tidak hanya berurusan dengan altar saja, tetapi harus menjangkau berbagai dimensi kehidupan umat.

Keywords:

Pastoral Leadership

Church

Principles

Church Sosial Teaching

ABSTRACT

This article provides a theological basis inspired by the idea of principles of church social teaching for the praxis of Christian pastoral leadership. The author will highlight a number of important messages in the concept of principles of church social teaching to make them relevant to the praxis of Christian pastoral leadership. Using qualitative methods and a literature study approach, this article explains that from the idea on principles of church social teaching, pastoral leadership emphasizes the principle of participation of all believers in the implementation of pastoral work. A leader, in this case the clergy, must be able to build harmonious communication with all the faithful, especially in determining pastoral activities. In addition, pastoral leadership is carried out with the active involvement of the pastoral leader in the concrete situations of the people's lives so that the pastoral policies determined are contextual to the situation of the people and ultimately offer diaconal pastoral leadership as a form of the Church's concern for social reality. Thus, pastoral leadership does not only deal with the altar, but must reach various dimensions of the people's life.

PENDAHULUAN

Kepemimpinan pastoral adalah salah satu aspek penting dalam manajemen pastoral.¹ Kepemimpinan pastoral mencakup fungsi koordinasi dalam kegiatan pastoral serta pemanfaatan potensi manusia dan sumber daya material untuk mencapai tujuan pastoral.² Kepemimpinan pastoral adalah sebuah tindakan iman dan iman selalu berhubungan dengan visi Tuhan.³ Praksis iman yang sesungguhnya bukan hanya tentang doa, melainkan keterbukaan dan kepekaan terhadap realitas sosial. Itulah sebabnya, kepemimpinan pastoral yang dibangun atas dasar iman kristen tidak sekadar hanya berurusan dengan liturgi atau altar, tetapi jauh lebih luas yaitu mencakup seluruh dimensi kehidupan konkret umat.⁴

Gereja melalui mekanisme kepemimpinan pastoral mesti hadir dan terlibat secara aktif dalam suka dan duka serta kecemasan dan harapan dunia dewasa ini. Hal ini berarti bahwa kepemimpinan pastoral Kristiani memberi aksentuasi pada otoritas Gereja sebagai sebuah institusi yang mengarahkan perhatian pada upaya keterlibatan praksis dalam kehidupan umat beriman. Tentang keterlibatan praksis dalam kehidupan umat beriman, Paus Fransiskus berbicara tentang mekanisme kepemimpinan “gembala berbau domba”.⁵ Kepemimpinan “gembala berbau domba” adalah model kepemimpinan melayani yang mengambil bagian secara aktif dalam kehidupan umat sehingga umat juga terdorong untuk bekerja sama dalam mengupayakan transformasi hidup.⁶

Gembala yang sejati melaksanakan pewartaan Injil dengan menjaga keseimbangan antara kata dan kesaksian hidup, melakukan penghambaan diri, dan merespons secara aktif penderitaan dalam diri sesama. Dari perspektif kepemimpinan pastoral, “gembala berbau domba” menjadi model kepemimpinan pastoral alternatif terhadap model kepemimpinan yang bercorak feodalisme klerikal. Feodalisme klerikal menekankan mekanisme kepemimpinan yang menempatkan kaum klerus sebagai golongan pertama untuk dijadikan sebagai rujukan utama segala macam hal yang berhubungan dengan karya pastoral dan kaum awam sebagai golongan kedua yang hanya berperan sebagai pelaksana dan pelancar karya

¹ Panitia Sinode III Keuskupan Ruteng, *Dokumen Sinode III 2013-2015 Keuskupan Ruteng Pastoral Kontekstual Integral* (Yogyakarta: Penerbit asdaMEDIA, 2017). 29.

² Gahamanyi Deo and Zacharia Shitote, “Empowering Church Leaders in Leadership Effectiveness: A Transformational Approach in Anglican Church in Butare Rwanda, Africa,” *European Modern Studies Journal* 7, no. 2 (2023): 326–333.

³ Georges Nicolas Djone et al., “God’s Vision and Faith as the Basis of the Effectiveness of a Church Leader’s Ministry,” *Asian Journal of Philosophy and Religion* 1, no. 2 (2022): 73–80.

⁴ Samuel Herman and Rinaldi Dharmawan, “Pemimpin Sejati Dengan Pola Kepemimpinan Yesus,” *Skenoo: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 4, no. 1 (2024): 24–36.

⁵ Martin Chen, “Gembala Berbau Domba: Refleksi Biblis-Teologis Tentang Gembala,” in *Omnia in Caritate Lakukanlah Semua Dalam Kasih Kenangan Tahbisan Uskup Mgr. Siprianus Hormat Uskup Keuskupan Ruteng*, ed. Max Regus and Fidelis Den (Jakarta: Penerbit Obor, 2020), 51–65.

⁶ Yudit Akka and Orindevisa, “Penerapan Kepemimpinan Karismatik Dalam Meningkatkan Spiritualitas Pemuda GPSDI Jemaat Gratia Pattengko Kecamatan Tomoni Timur,” *Skenoo: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 3, no. 1 (2023): 13–26.

pastoral berdasarkan arahan dari kaum klerus.⁷ Feodalisme klerikal menjadikan kaum klerus atau pastor sebagai pusat dari seluruh karya pastoral. Problemnya ialah kepemimpinan pastoral secara pator-sentris bertentangan dengan hakikat Gereja sebagai sebuah persekutuan yang menjunjung tinggi prinsip partisipasi, subsidiaritas, dan hakikat dari imamat ministerial yang dimiliki oleh kaum klerus.⁸

Berbeda dengan kepemimpinan pastoral yang bercorak feodalisme klerikal, model kepemimpinan “gembala berbau domba” menempatkan kaum klerus dan kaum awam pada posisi yang setara dan saling menghargai satu sama lain. Dalam semua tahapan karya pastoral yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, kaum klerus dan kaum awam mesti bersinodalitas. Sinodalitas kaum klerus dan kaum awam dalam menyukseskan karya pastoral menjadi salah satu pesan penting yang terkandung dalam prinsip-prinsip Ajaran Sosial Gereja (selanjutnya disingkat ASG).

Prinsip-prinsip ASG memberikan sejumlah nilai penting tentang bagaimana pelaksanaan kepemimpinan pastoral Kristiani. Pelaksanaan kepemimpinan pastoral Kristiani dalam perspektif prinsip-prinsip ASG menjadi urgen di tengah realitas adanya jurang lebar yang memisahkan antara para pemimpin Gereja dan umat beriman serta praktik kepemimpinan pastoral yang bercorak pastorsentris. Dalam perspektif prinsip-prinsip ASG, para pemimpin Gereja dituntut untuk melayani umat secara lebih efektif dan efisien dengan mengutamakan partisipasi langsung dan aktif dalam kehidupan umat sehingga dapat mengetahui lebih pasti kebutuhan umat. Dalam partisipasi tersebut, ada sikap saling mendengarkan antara pemimpin Gereja dan umat yang dilayani sehingga terwujudlah cita-cita Gereja sinodal yaitu Gereja yang saling mendengarkan dan terbuka untuk dapat saling belajar satu sama lain. Di satu pihak, umat yang dilayani diberi kebebasan untuk menyampaikan apa saja yang berhubungan dengan hidup dan karya pastoral. Di pihak lain, para pemimpin Gereja dituntut untuk responsif terhadap aspirasi umat dan bersama-sama berjalan untuk mencari solusi atas persoalan pastoral yang dihadapi.⁹

Dalam konteks kepemimpinan pastoral, prinsip-prinsip ASG menekankan konektivitas antara pemimpin Gereja dengan kebutuhan umat yang dilayani. Hal ini berimplikasi pada pemanfaatan otoritas untuk tujuan pelayanan serta pihak pelayan dan pihak yang dilayani adalah sesama peziarah dalam perjalanan yang sama.¹⁰ Pada titik ini, para pemimpin Gereja ditantang untuk menghayati pesan penting konsep piramida terbalik yang

⁷ Jean Loustar Jewadut and Fransiska Rosari Nirmala, “Peran Komunitas Basis Gerejawi Bagi Efektivitas Pelaksanaan Karya Pastoral Partisipatif Dan Kontekstual,” *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik* 23, no. 2 (2023): 10–26.

⁸ Silvester Manca, “Kepemimpinan Pastoral Bercorak Pastor-Sentris Dalam Perspektif Teologi,” *Jurnal Alternatif Wacana Ilmiah Interkultural* 10, no. 1 (2021): 13–26.

⁹ I Wayan Agus Wiratama, “Signifikansi Paradigma Kepemimpinan Intergenerasional Menurut Gary L. McIntosh Bagi Revitalisasi Pelayanan Tim Kemajelisan Gereja,” *Skenoo: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 4, no. 1 (2024): 51–72.

¹⁰ Rikardus Jehaut, “Membedah Diskursus Sinodalitas Paus Fransiskus Dan Relevansinya Terhadap Kehidupan Menggereja Di Indonesia,” *Jurnal Ledalero* 21, no. 105–120 (2022).

digemakan oleh Paus Fransiskus di mana bagian atas berada di bawah dasarnya. Artinya, kepemimpinan pastoral dalam Gereja mesti dipahami dalam konteks pelayanan dan kuasa yang dimiliki harus dihubungkan dengan kuasa salib.¹¹

Artikel ini memberikan pendasaran dengan berinspirasi pada gagasan tentang prinsip-prinsip ASG untuk praksis kepemimpinan pastoral Kristiani. Selain itu, pendasaran pada prinsip-prinsip ASG juga digunakan untuk mengkritik problem dasar kepemimpinan pastoral Kristiani yang cenderung pastorsentris dengan sentralisasi pengambilan keputusan pastoral di tangan kaum klerus. Atas dasar itu, artikel ini berusaha menjawab rumusan masalah, yaitu bagaimana pelaksanaan kepemimpinan pastoral kristiani dalam perspektif prinsip-prinsip ASG? Dari rumusan masalah tersebut, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan kepemimpinan pastoral kristiani dalam perspektif prinsip-prinsip ASG. Tulisan ini mengelaborasi sejumlah pesan penting dalam prinsip-prinsip ASG untuk direlevansikan dengan praksis kepemimpinan pastoral kristiani. Studi ini diharapkan dapat berkontribusi pada praksis kepemimpinan pastoral kristiani demi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan karya pastoral Gereja.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan berfokus pada tinjauan referensi secara mendalam yang dilengkapi dengan analisis isi sistematis dari sumber primer dan sekunder. Dokumen utama yang diteliti sebagai sumber primer adalah kompendium Ajaran Sosial Gereja Dokumen ini dianalisis secara mendalam untuk mengekstraksi tema-tema terkait prinsip-prinsip ASG dan implikasinya terhadap kepemimpinan pastoral kristiani.¹² Selain membuat analisis terhadap sumber primer, berbagai sumber sekunder juga dianalisis untuk mendukung dan memperdalam temuan-temuan dari sumber primer. Hal ini mencakup buku-buku, artikel jurnal, dan publikasi online yang kredibel yang membahas tema-tema terkait prinsip-prinsip ASG dan kepemimpinan pastoral kristiani.

Pemilihan sumber-sumber didasarkan pada analisis terhadap relevansinya dengan pertanyaan dan tujuan penelitian, sehingga memastikan pemahaman yang komprehensif tentang pokok bahasan. Analisis isi melibatkan pengkodean data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi tema dan pola yang berulang.¹³ Metode ini memungkinkan adanya evaluasi sistematis mengenai bagaimana prinsip-prinsip ASG didiskusikan dan dilaksanakan dalam konteks kepemimpinan pastoral kristiani. Analisis dilakukan secara bertahap, dimulai dengan identifikasi bagian-bagian yang relevan, mengkategorikan kutipan-kutipan berdasarkan tema yang telah ditentukan, dan menafsirkan data yang dikumpulkan untuk membentuk wawasan

¹¹ Ibid.

¹² Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana* 8, no. 2 (2014): 177-1828.

¹³ Mojtaba Vaismoradi, Hannele Turunen, and Terese Bondas, "Content Analysis and Thematic Analysis: Implications for Conducting a Qualitative Descriptive Study," *Nursing and Health Sciences* 15, no. 3 (2013): 398-405.

yang koheren tentang implikasi gagasan prinsip-prinsip ASG bagi praksis kepemimpinan pastoral kristiani.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian ASG

Dalam pengertian yang lebih komprehensif, ASG dapat dimaknai sebagai tanggapan Gereja terhadap persoalan-persoalan sosial, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, lingkungan hidup, dan kebudayaan.¹⁵ Ajaran Sosial Gereja menunjuk pada ensiklik-ensiklik yang dimulai dengan *Rerum Novarum* dari Paus Leo XIII pada 1891.¹⁶ Sejumlah ensiklik yang dianggap sebagai ASG adalah: *Rerum Novarum*, *Quadragesimo Anno* (Pius XI, 1931), *Mater et Magistra* (Yohanes XXIII, 1961), *Pacem in Terris* (Yohanes XXIII, 1963), *Gaudium et Spes* (Konsili Vatikan II, 1965), *Populorum Progressio* (Paulus VI, 1967), *Octogesima Adveniens* (Paulus VI, 1971), *Convenientes Ex Universo* (Amanat Sinode Uskup, 1971), *Evangelii Nuntiandi* (Paulus VI, 1975), *Redemptor Hominis* (Yohanes Paulus II, 1979), *Laborem Exercens* (Yohanes Paulus II, 1979), *Sollicitudo Rei Socialis* (Yohanes Paulus II, 1987), *Centesimus Annus* (Yohanes Paulus II, 1991).

ASG adalah pemikiran dan sikap Gereja dalam merespons masalah zaman. ASG, seperti yang tercantum dalam berbagai ensiklik para Paus, berusaha mengamati, merenungkan, dan memberikan nilai-nilai sebagai pedoman untuk umat beriman kristiani dalam menangani masalah sosial yang muncul. Dengan kata lain, ASG menggabungkan berbagai pemahaman tentang tatanan masyarakat dari perspektif keselamatan kristiani. ASG bertujuan menyediakan materi untuk refleksi, mengembangkan standar penilaian, dan mengembangkan arahan untuk bertindak.

Hidup dan martabat manusia, hak dan kewajiban manusia, martabat kerja dan hak pekerja, keberpihakan pada yang miskin, solidaritas, dan panggilan pada komunitas dan keluarga adalah tema dasar ASG. ASG adalah refleksi Gereja atas realitas sosial dengan menilainya dalam terang Injil sambil memberikan arahan untuk tindakan praktis dalam masyarakat.¹⁷ ASG menuntun Gereja untuk menafsirkan realitas kehidupan masyarakat dan menyarankan cara bertindak secara kristiani di lingkungan sosial yang sesuai dengan visi Injil.

Secara lebih spesifik, ASG berusaha menyelesaikan masalah keadilan sosial dalam terang Injil Kristus dengan menyampaikan ajaran Gereja tentang masalah keadilan yang harus diperjuangkan di seluruh dunia. Ini menunjukkan bahwa Gereja harus menyadari bahwa ia bertanggung jawab atas masalah sosial kemasyarakatan yang terjadi dan berkembang. Ada tiga tahap di mana kesadaran akan perkembangan struktur sosial tersebut muncul. *Pertama*,

¹⁴ Yurmaini et al., "Pendekatan Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif," *Hibrul Ulama: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keislaman* 6, no. 1 (2024): 83–90.

¹⁵ Maridina Makiliuna et al., "Ajaran Sosial Gereja Melihat Kemiskinan Dan Keadilan Melalui Lensa Mater et Magistra," *In Theos : Jurnal Pendidikan dan Theologi* 4, no. 2 (2024): 38–44.

¹⁶ A. Eddy Kristiyanto, "Mengenali Konteks Ajaran Sosial Gereja Katolik Abad XIX," *Orientasi Baru* 21, no. 1 (2012): 35–54.

¹⁷ Xaverius Chandra, "Kebaikan Umum Dalam Ajaran Sosial Gereja," *Jurnal Filsafat Areté* 9, no. 1 (2020): 60–61.

tahap karitatif. Tahap ini dimotivasi oleh cinta Allah sendiri yang hidup dalam Roh Kudus untuk memberikan perhatian langsung kepada mereka yang lemah, miskin, telanjang, lapar, atau dipenjara.¹⁸

Kedua, tahap ajaran sosial. Metode ini berbeda dari metode karitatif. Pada tahap ini, perhatian lebih diberikan pada struktur sosial, yang merupakan inti dari masalah sosial. Struktur sosial yang menindas adalah hal penting yang harus diubah untuk membantu orang yang mengalami kesusahan.¹⁹

Ketiga, tahap himbauan profetis bersama dengan solidaritas praktis. Setelah Paus Yohanes XXIII, pendekatan ASG mendapat dimensi baru. Gereja mulai menyadari bahwa memberikan ajaran lisan tidak cukup untuk menyelesaikan masalah sosial. Maklumat profetis dan solidaritas praktis lebih penting daripada ajaran. Solidaritas praktis berarti berusaha untuk selalu berada di sisi penderita dan melakukan segala upaya yang dikehendaki oleh Allah bagi para penderita.²⁰

Sumber Wewenang ASG dan Sifat tidak Mutlak ASG

Pada prinsipnya, ASG terbentuk dari dua unsur, yaitu norma-norma etis kristiani dan penerapan norma-norma tersebut dalam situasi sosial, ekonomi, politik, dan kultural masyarakat. Atas dasar itu, ASG dibentuk berdasarkan dua sumber. *Pertama*, norma-norma fundamental dalam kehidupan masyarakat bersumber pada gambaran manusia sebagai citra Allah. ASG didasarkan pada keyakinan iman bahwa setiap orang mempunyai martabat yang sama dan sederajat serta mesti diperlakukan secara adil. *Kedua*, ASG juga bersumber pada analisis ilmu-ilmu sosial. Pertanyaan tentang bagaimana masyarakat secara konkret harus terwujud agar manusia diperlakukan sesuai tuntutan Injil, bagaimana pembentukan hubungan kerja, cara mengorganisasikan produksi industrial, penataan pemanfaatan sumber daya alam, dan susunan politik yang paling relevan hanya dapat dipelajari melalui penelitian terhadap masyarakat dengan bantuan analisis ilmu-ilmu sosial.²¹

ASG tidak langsung diperoleh dari wahyu, tetapi merupakan hasil penerapan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan kristiani dalam kehidupan masyarakat dengan segala aspek kehidupan yang didasarkan pada hasil analisis ilmu-ilmu sosial. Atas dasar itu, ASG tidak bersifat mutlak. Gereja Katolik tidak pernah mengaku bahwa ajaran sosialnya sebagai satu-satunya sumber kebenaran. ASG bukanlah suatu ajaran yang sudah mengandung kesempurnaan dan finalitas dalam dirinya sendiri, melainkan suatu ajaran yang terus terbuka terhadap penyesuaian dengan perkembangan dalam masyarakat dan kemajuan-kemajuan berkat globalisasi. Itulah sebabnya, ajaran ini kiranya hanya mempertegas posisi kekatolikan dalam rangka berdialog dengan dunia yang otonom sekaligus niatan tulus untuk berjumpa serta bekerja sama dengan orang-orang yang bekehendak baik dalam memajukan

¹⁸ Frans-Magnis Suseno, *"Gereja Berhadapan Dengan Ketidakadilan. Ajaran Sosial Gereja"* (Jakarta, 1983).

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

peradaban.²² Hal ini mengafirmasi bahwa iman dan teologi Gereja secara hakiki bersifat dialogal dan ini merupakan kesadaran teologis (sosiologis) baru.²³ Aspek lain yang mesti diperhatikan ialah ASG juga memuat ajaran yang dapat dipahami oleh orang-orang di luar Gereja karena tidak saja bersumber pada Kitab Suci, melainkan juga bersumber pada pengetahuan ilmiah dan analisis sosial tentang masalah-masalah kemasyarakatan. Dalam hal ini, Gereja juga dapat dikritik dan mesti menanggapi kritik. Itulah sebabnya, Gereja selalu membutuhkan ahli-ahli di bidang ilmu sosial dan etika kemasyarakatan.²⁴

Pendekatan ASG: dari Pendekatan *Magistra* ke Pendekatan *Propheta*

Ensiklik-ensiklik pertama yang masuk dalam ASG masih berkuat pada upaya pemberian ajaran yang komprehensif tentang penataan masyarakat industri. Namun, sejak tahun 1960-an, orientasi Gereja mulai berubah. Gereja tidak lagi berperan untuk memberikan pengetahuan atau teori tentang penataan kehidupan masyarakat, tetapi mengajukan dengan tegas prinsip-prinsip dasar kehidupan manusia seperti penghormatan terhadap martabat manusia, kesejahteraan umum, partisipasi, subsidiaritas, dan solidaritas, lalu berdasarkan prinsip-prinsip tersebut mengkritik situasi konkret masyarakat serentak menuntut perubahan yang radikal. Paus Yohanes Paulus II, misalnya, menegaskan bahwa “tetapi Gereja menganggap sebagai tugasnya untuk terus menerus menunjuk pada martabat dan hak-hak manusia pekerja dan untuk mencela keadaan-keadaan di mana martabat dan hak-hak itu dilanggar dan juga untuk ikut menyumbang untuk memberi arah kepada perubahan-perubahan sedemikian rupa sehingga menghasilkan kemajuan sejati bagi manusia dan masyarakat”.²⁵ Gagasan ini menjadi penanda bahwa terjadi pergeseran pendekatan dalam ASG, yaitu dari pendekatan pola guru (*magistra*) ke pendekatan pola nabi (*propheta*).

Pendekatan pola guru dijalankan dengan mekanisme transfer pengetahuan kepada muridnya, sedangkan pendekatan pola nabi dijalankan dengan pengajuan tuntutan Allah kepada manusia dalam konteks tertentu. Seorang nabi belum tentu memiliki pengetahuan yang lebih memadai dari para pendengarnya. Kelebihan seorang nabi ialah mengalami tuntunan Roh Kudus yang membawanya kepada pemahaman tentang kehendak Allah dalam konteks kehidupan masyarakat. Seorang nabi bertindak atas nama Allah untuk mengajukan kritik konstruktif demi perbaikan kehidupan masyarakat.

Pergeseran dari pendekatan *magistra* ke pendekatan *propheta* dalam ASG sangat tepat dengan dua alasan mendasar.²⁶ *Pertama*, Gereja tidak memiliki sumber pengetahuan tersendiri tentang bagaimana masyarakat harus disusun. *Kedua*, Gereja dianugerahi Roh Kudus, maka Gereja diwajibkan dan dimampukan untuk menilai, menuntut, dan mengkritik situasi

²² Ibid.

²³ Frans-Magnis Suseno, “‘Tinjauan Terhadap Buku Armada Riyanto, Katolisitas Dialogal: Ajaran Sosial Katolik,’” *Diskursus - Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara* 17, no. 137-139 (2014).

²⁴ Suseno, “*Gereja Berhadapan Dengan Ketidakadilan. Ajaran Sosial Gereja.*”

²⁵ Paus Yohanes Paulus II, *Laborem Exercens* (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Wali Gereja Indonesia, 1995).

²⁶ Suseno, “*Gereja Berhadapan Dengan Ketidakadilan. Ajaran Sosial Gereja.*”

kehidupan masyarakat. Pendekatan *propheta* memang mengandung risiko karena setiap penilaian, kritikan, dan tuntutan membawa Gereja pada konflik dengan kekuatan yang bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap prinsip hidup bersama yang sesuai dengan martabat manusia.²⁷

Prinsip-Prinsip Ajaran Sosial Gereja

Prinsip Penghormatan terhadap Martabat Manusia

Salah satu tema dan prinsip utama ASG adalah penghormatan terhadap martabat manusia. Martabat berasal dari kata *dignity* (Ing.) atau *dignitas* (Lat.), yang akarnya adalah *dignus* (Lat.) atau *noble* (Ing.), yang berarti "luhur" atau "mulia".²⁸ Keyakinan bahwa manusia diciptakan menurut citra Allah sendiri adalah dasar dari gagasan tentang penghormatan terhadap martabat manusia. Hidup manusia dianggap suci, berharga, dan transenden dalam dirinya sendiri sebagai ciptaan yang serupa dengan Allah. Martabat manusia berasal dari Allah secara gratis, bukan sebagai imbalan atas upaya dan pencapaian manusia. Oleh karena itu, setiap orang memiliki martabat yang sama, terber, setara, dan tidak dapat dicabut oleh orang lain dengan alasan apa pun.

Paus Yohanes Paulus II mengatakan bahwa keistimewaan manusia yang bermartabat terkait dengan persona. Dia menggambarkan manusia sebagai makhluk dengan martabat tinggi yang diberikan oleh Allah sendiri, dan karena itu ia adalah persona, dengan kepemilikan akal budi, kehendak bebas, dan suara hati.²⁹ Seorang individu tidak boleh digunakan untuk tujuan apa pun. Ini berarti bahwa setiap upaya untuk meningkatkan kehidupan manusia atau masyarakat harus mengutamakan martabat manusia sebagai individu yang berpengetahuan, berkehendak bebas, dan bersuara hati nurani. Prinsip utama keterlibatan sosial Gereja adalah martabat pribadi manusia, yang menjadi dasar, sebab, dan tujuan utama semua lembaga sosial.³⁰

Pribadi manusia diciptakan secara unik, yang ditunjukkan oleh pengalaman hidupnya yang tidak dapat dibandingkan dengan orang lain. Ini menunjukkan bahwa tidak dapat dibenarkan setiap upaya untuk menurunkan status seorang individu dengan memaksanya masuk ke dalam kategori atau sistem kekuasaan yang sudah dibentuk sebelumnya, entah berdasarkan ideologi atau yang lainnya.³¹ Penghormatan terhadap martabat transenden pribadi manusia harus menjadi dasar masyarakat yang adil. Pada kenyataannya, semua

²⁷ Ibid.

²⁸ Arthur R. Madigan, "Some Observation on Evangelium Vitae," in *Prophecy and Diplomacy, The Moral Doctrine of John Paul II*, ed. John J. Conley SJ - Joseph Koterski SJ (New York: Fordham University Press, 1999), 306-312.

²⁹ Paus Yohanes Paulus II, *Redemptor Hominis* (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Wali Gereja Indonesia, 1995).

³⁰ Makiliuna et al., "Ajaran Sosial Gereja Melihat Kemiskinan Dan Keadilan Melalui Lensa Mater et Magistra."

³¹ Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*, ed. Yosef Maria Florisan, Paul Budi Kleden, and Otto Gusti Madung (Maumere: Penerbit Ledalero, 2013). 88.

inisiatif yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya harus dimotivasi oleh kesadaran bahwa setiap individu memiliki keunggulan atas masyarakat.³²

Fakta bahwa setiap orang adalah gambar Allah memiliki tiga konsekuensi.³³ *Pertama*, martabat setiap orang berasal dari Allah. Karena martabat manusia bukan hasil dari upaya, usaha, atau prestasi manusia sendiri, melainkan berkat Allah sendiri. *Kedua*, karena manusia diciptakan menurut citra Allah, kemajuan seluruh masyarakat harus berkontribusi pada kesejahteraan individu. *Ketiga*, manusia memiliki dimensi sosial yang tidak dapat diabaikan. Secara mendasar, manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung dan bersosialisasi. Dimensi sosial ini membentuk dasar yang kokoh untuk prinsip-prinsip kesejahteraan umum dan solidaritas dalam kehidupan manusia dalam Ajaran Sosial Gereja.

Prinsip martabat yang tak tergantikan ini, yang merupakan acuan terdekat dalam budaya modern, adalah deklarasi universal hak-hak asasi manusia, yang telah menjadi tonggak sejarah dalam perjalanan panjang umat manusia dan merupakan pernyataan tertinggi dari kesadaran umat manusia. Ini menunjukkan bahwa hak-hak asasi manusia berlaku bagi semua orang, kapan saja, dan tanpa pengecualian.³⁴ Hak-hak tersebut bukan hanya hak individu tetapi juga hak sosial; hak-hak ini berlaku untuk individu dan bangsa.

Prinsip Kesejahteraan Umum

Kesejahteraan umum adalah keseluruhan kondisi kemasyarakatan yang memungkinkan individu maupun kelompok untuk secara lebih penuh dan lebih lancar mencapai kesempurnaan hidup dalam berbagai aspek. Dari perspektif ini, kesejahteraan umum tidak dapat didefinisikan sebagai akumulasi kesejahteraan setiap individu atau kelompok. Sebaliknya, kesejahteraan umum merupakan keadaan kesejahteraan yang diperoleh, ditingkatkan, dan dilestarikan secara kolektif baik secara pribadi maupun komunal, atau masyarakat. Kesejahteraan umum dimiliki oleh semua orang dan setiap individu, sehingga tetap "umum" karena tidak dapat dipecahkan.³⁵

ASG berangkat dari kesadaran akan sifat manusia yang mengejar kepenuhannya sebagai makhluk sosial. Kesempurnaan mencakup perdamaian, ketertiban, kebebasan, keadilan, kesetaraan, penghormatan hak-hak dasar manusia, sistem kesehatan publik, pendidikan, kesehatan, air, listrik, energi, pertahanan, penegakan hukum, sistem jaminan sosial, dan lain-lain. Tidak mungkin bagi manusia untuk mencapai hal-hal tersebut secara sendiri-sendiri. Karena itu, kolaborasi menjadi sesuatu yang sangat urgen.

Kesejahteraan umum harus mencakup semua orang dalam masyarakat. Tuntutan untuk melibatkan semua anggota masyarakat terkait dengan prinsip partisipasi dalam usaha

³² Ibid. 89.

³³ Vinsensius Bawa Toron and Yohanes Marinus, "'Ajaran Sosial Gereja Tentang Membangun Keluhuran Martabat Manusia Sebagai Citra Allah,'" *In Veritate Lux Jurnal Ilmu Kateketik Pastoral Teologi, Pendidikan Antropologi, dan Budaya* 01, no. 01 (2018): 1-6.

³⁴ Otto Gusti Madung, "Martabat Manusia Sebagai Basis Etis," *Diskursus: Jurnal Filsafat dan Teologi Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara* 11, no. 2 (2012): 160-173.

³⁵ Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*. 112.

atau kerja sesuai dengan kemampuan masing-masing, termasuk partisipasi dalam menikmati hasil dari usaha pembangunan dan kemajuan bersama. ASG mengusulkan agar semua harta benda dan potensi alam digunakan secara adil oleh semua orang, karena diperlukan kesempatan yang sama untuk menikmati kesejahteraan umum. Untuk kesejahteraan hidup setiap orang, setiap orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya alam.³⁶

Satu hal yang juga penting di bahas dalam prinsip ini ialah soal kepemilikan barang pribadi dan uang. Barang milik dan uang mesti dipandang sebagai sarana yang dapat melayani tugas perutusan. Namun, secara faktual tidak jarang ditemukan kecenderungan untuk mengubahnya menjadi tujuan, entah secara individual maupun kolektif. Dan ketika hal ini, maka *homo sapiens* dinodai dan menjadi insan *homo oeconomicus* – dalam pengertian yang negatif – insan yang individualistik, penuh perhitungan dan mau menguasai.³⁷

Prinsip Subsidiaritas

Menurut prinsip subsidiaritas, institusi yang lebih tinggi harus membantu, mendukung, dan mengembangkan institusi yang lebih rendah. Dengan cara ini, satuan sosial yang lebih kecil memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas yang diembankan kepada mereka, sehingga martabat, eksistensi, dan peran mereka tetap jelas. Prinsip subsidiaritas, dalam arti yang lebih positif, mengatakan bahwa bantuan atau intervensi apapun dari negara sedapat mungkin tidak akan membatasi eksistensi dan mobilitas kelompok sosial yang lebih kecil. Institusi keluarga, kelompok, paguyuban, dan komunitas lokal termasuk dalam kelompok sosial kecil ini. Satuan-satuan ini membantu pranata sosial yang lebih besar, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. dan secara bersamaan.³⁸

Prinsip subsidiaritas sangat penting karena dapat melindungi orang dari praktik penyelewengan kekuasaan oleh otoritas yang lebih tinggi. Ini karena prinsip subsidiaritas menentang sistem sentralisasi, birokratisasi, dan kehadiran negara yang tidak sah dan terlalu berlebihan dalam mekanisme pemerintahan.³⁹ Selain itu, untuk mewujudkan prinsip subsidiaritas, diperlukan penghormatan dan upaya untuk membantu individu dan keluarga; pengakuan dan penghargaan terhadap organisasi dan serikat pekerja; dan mendorong peran swasta dalam membantu kesejahteraan umum. Penghargaan terhadap fakta kemajemukan sosial dan pembelaan hak-hak kaum minoritas juga penting. Selain itu, prinsip subsidiaritas menuntut untuk mengupayakan desentralisasi birokrasi dan administrasi, serta mengupayakan keseimbangan antara ranah publik dan privat.⁴⁰

Prinsip subsidiaritas memungkinkan setiap orang untuk melakukan peran yang mereka miliki untuk memperbaiki situasi masyarakat. Dengan melakukannya, prinsip subsidiaritas membawa harapan untuk masa depan yang lebih baik dan adil; mengundang kita untuk merancang masa depan bersama, menginginkan hal-hal besar, dan memperluas

³⁶ Ibid. 116-125.

³⁷ Paus Fransiskus, "Ajaran Sosial Gereja Di Masa Pandemi," *Dokpen Kwi* (2020): 1-54.

³⁸ Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*. 125-127.

³⁹ Ibid. 127.

⁴⁰ Ibid. 128.

cakrawala dan gambaran ideal kita. Karena itu, salah satu implikasi khas dari prinsip subsidiaritas adalah keterlibatan, yaitu tugas yang harus dilakukan secara sadar oleh setiap orang dengan rasa tanggung jawab demi mencapai kesejahteraan bersama. Salah satu wujud dari hubungan Gereja dengan dunia adalah keterlibatan konkretnya dalam masyarakat.⁴¹

Prinsip Keterlibatan atau Partisipasi

Salah satu konsekuensi khas dari prinsip subsidiaritas adalah partisipasi. Partisipasi mengandung tiga hal penting.⁴² *Pertama*, ASG menghendaki keterbukaan akses dan stimulus yang mendorong orang miskin dan menderita untuk berpartisipasi. *Kedua*, ASG menghendaki pergantian secara berkala para pemimpin politik untuk mencegah praktik sentralisasi tersembunyi, termasuk mencegah munculnya rezim otoriter. *Ketiga*, ASG menyatakan bahwa keterlibatan warga dalam berbagai bidang urusan kemasyarakatan adalah salah satu pilar utama dan jaminan kelestarian demokrasi.

Prinsip Solidaritas

Solidaritas selalu dilihat dalam dua aspek, yaitu sebagai prinsip sosial dan sebagai kebajikan moral, yang pada dasarnya saling melengkapi, untuk mempertahankan sifat sosial manusia dan memperkuat kesetaraan martabat dan hak dasar manusia. Pada hakikatnya, solidaritas mengacu pada sesuatu yang lebih daripada sekadar tindakan kemurahan hati yang sesaat. Untuk mencapai solidaritas, seseorang harus membangun perspektif baru yang didasarkan pada komunitas dan membuat kehidupan lebih penting daripada mengumpulkan barang milik sedikit orang.⁴³

ASG menyatakan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara solidaritas dan kesejahteraan umum, solidaritas dan tujuan harta benda universal, solidaritas dan kesetaraan di antara semua orang dan bangsa, dan solidaritas dan perdamaian di seluruh dunia.⁴⁴ Secara teologis, prinsip solidaritas didasarkan pada contoh hidup Kristus sendiri, yang mengorbankan diri-Nya sendiri untuk mati di atas kayu salib demi menebus dosa manusia. Keseluruhan hidup dan karya Yesus menunjukkan makna solidaritas dan cinta kasih. Dengan melihat bagaimana Yesus bertindak, solidaritas adalah upaya untuk melampaui diri sendiri dan kelompok, menghidupkan nilai-nilai Kristen seperti kemurahan hati, pengorbanan, pengampunan, dan perdamaian.⁴⁵

Kepemimpinan Pastoral Kristiani dalam Perspektif Prinsip-Prinsip ASG

Di tengah krisis kepemimpinan pastoral dewasa ini, umat sangat merindukan mekanisme dan model kepemimpinan pastoral yang bisa menjawab konteks kehidupan

⁴¹ B. Kieser, *Solidaritas 100 Tahun Ajaran Sosial Gereja* (Yogyakarta: Kanisius, 1992).

⁴² Ibid.

⁴³ Paus Fransiskus, *Evangelii Gaudium* (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Wali Gereja Indonesia, 2014). Art. 188.

⁴⁴ Paus Fransiskus, "Ajaran Sosial Gereja Di Masa Pandemi." 133.

⁴⁵ Ibid. 135.

umat. Gagasan tentang prinsip-prinsip ASG beserta aspek-aspek penting yang terkandung di dalamnya sangat relevan untuk dijadikan sebagai basis argumentasi dalam menjelaskan mekanisme dan model kepemimpinan pastoral Kristiani yang bisa membawa perubahan signifikan bagi karya pastoral Gereja. Oleh karena itu, pada bagian ini kami menjelaskan model kepemimpinan pastoral Kristiani dalam perspektif prinsip-prinsip ASG.

Kepemimpinan Pastoral Partisipatif

Prinsip-prinsip ASG menyoroti kepemimpinan pastoral kristiani yang menempatkan partisipasi aktif semua umat beriman sebagai prioritas. Atas dasar itu, kepemimpinan pastoral tidak boleh dijalankan dengan hanya berpusat pada seseorang atau sekelompok orang saja. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan kepemimpinan pastoral mengungkapkan proses pengorganisasian kehidupan umat dalam berbagai aspek pastoral yang mengutamakan partisipasi semua umat beriman, sesuai dengan panggilan mereka masing-masing.⁴⁶ Dengan kata lain, perspektif prinsip partisipasi dalam ASG menggugat kepemimpinan pastoral yang cenderung mengarah kepada pemerintahan sepihak oleh segelintir orang.

Dalam perspektif prinsip-prinsip ASG, model kepemimpinan yang diusung ialah bukan kepemimpinan yang otoriter dan *single fighter*, melainkan kepemimpinan yang bersifat partisipatif. Gagasan dan praksis kepemimpinan partisipatif dapat dengan mudah dipahami dalam bingkai simbol piramida terbalik yang digagas oleh Paus Fransiskus. Model piramida terbalik membuat lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dan berbagi tanggung jawab. Partisipasi aktif dari semua umat beriman lebih diprioritaskan ketimbang peran beberapa orang yang mengatur proses dan kegiatan pastoral. Dalam hal ini, model piramida terbalik untuk Gereja sinodal berinspirasi pada perspektif eklesiologi Yesus dan eklesiologi Konsili Vatikan II.

Aksentuasi pada koinonia Gereja atas dasar pemahaman Gereja sebagai Umat Allah tidak secara sederhana berarti peremehan terhadap peran hierarki Gereja. Sebaliknya, antara hierarki dan umat awam harus bersatu dan berjalan beriringan. Dalam sebuah Gereja yang sinodal, kelestarian tradisi kerasulan yaitu sebuah struktur hierarkis yang digabungkan dengan rezim persekutuan dan kesepakatan yang konkret mesti tetap terpelihara.⁴⁷ Singkatnya, gagasan tentang koinonia sebagai Umat Allah mengintensifkan gotong royong atau kolaborasi dalam pewartaan Injil sesuai dengan peran masing-masing tanpa harus mengklerikalisasikan kaum awam dan mensekularisasikan kaum klerus.⁴⁸

Kolaborasi antara klerus dan awam berangkat dari kenyataan kekayaan karisma dan potensi anggota Gereja yang bisa dimanfaatkan untuk memajukan karya pastoral Gereja. Kekayaan karisma dan potensi, baik yang dimiliki secara pribadi maupun secara komunal di kalangan Umat Allah mendorong kaum klerus untuk meninggalkan praktik *single fighter*

⁴⁶ Komisi Teologi Internasional, *Sinodalitas Dalam Kehidupan Dan Misi Gereja, Seri Dokumen Gerejawati* (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Wali Gereja Indonesia, 2022). Art. 67.

⁴⁷ Ibid. Art. 65.

⁴⁸ Ibid. Art. 104.

dalam berpastoral dan menghidupi semangat kolaborasi. Dalam kerja kolaboratif tersebut, ada diskusi bahkan saling kritik untuk kebaikan bersama dan berlanjut pada aksi-aksi konkret dalam kegiatan pastoral. Pihak yang kurang menyadari kekayaan karisma dalam Gereja dan keterbatasan kontribusi personalnya akan melihat diskusi, kritikan, dan kerja sama sebagai sebuah ancaman yang membahayakan posisinya.⁴⁹

Kepemimpinan Pastoral Tanda-Tanda Zaman

Seturut gagasan prinsip-prinsip ASG, maka amat perlu Gereja menjalankan praksis pastoral yang peka terhadap tanda-tanda zaman.⁵⁰ Kepemimpinan pastoral tanda-tanda zaman berpangkal pada manusia dengan dinamika pergulatan hidupnya di dunia. Gereja dituntut untuk keluar dari ruangan altar dan masuk ke dalam dunia untuk menemukan kehadiran Allah. Dengan pola pastoral yang selaras dengan tanda-tanda zaman, diharapkan muncul Gereja terlibat, yaitu Gereja yang menaruh kepekaan dan kepedulian terhadap perjuangan hidup manusia serta bergerak untuk bersolidaritas dengan sesama yang membutuhkan bantuan. Dalam hal ini, kepemimpinan pastoral tanda-tanda zaman menjadi sebuah otokritik terhadap Gereja yang cenderung menutup pintu agar bisa menikmati kemapanan, sebuah model Gereja yang dikritik oleh Paus Fransiskus. Paus Fransiskus menghendaki kehadiran Gereja dengan pintu yang selalu terbuka.

Gagasan Gereja pintu terbuka sangat urgen digaungkan dan diaktualisasikan dalam konteks karya pastoral Gereja di Indonesia sebab belum menjadi paradigma dan pedoman bagi praksis karya pastoral Gereja. Gereja di Indonesia sering dikeluhkan terjebak sebagai institusi yang hanya sibuk mengurus kesalehan religius melalui pastoral liturgisentris tanpa menjadi sibuk mengurus kompleksitas realitas kehidupan manusia yang menuntut keterlibatan aktif dalam bentuk pastoral diakonia.⁵¹ Aksentuasi berlebihan pada ritus dan praktik spiritual membuat kehadiran Gereja tertutup dan mengurung diri, kurang sinodal, juga menjadi tidak relevan dan signifikan bagi tantangan riil umat Allah. Padahal sejatinya, seluruh keberadaan Gereja, baik doa maupun kesaksiannya, mesti berpihak kepada mereka yang menderita dan cenderung menjadi korban.⁵²

Praksis Gereja seperti itulah yang kurang dijumpai di Indonesia. Sudah lama banyak Gereja di Indonesia yang mempraktikkan cara menjadi Gereja yang tertutup. Penghayatan iman dalam Gereja yang tertutup seperti itu membuat umat kristiani di Indonesia, seperti

⁴⁹ Evelyn Eaton Whitehead, "'Tanggung Jawab Dalam Imamat: Kisah Sebuah Pelayanan Yang Sedang Mekar,'" in *Imam Masa Kini*, ed. Donald J. Goergen (Maumere: Penerbit Ledalero, 2003). 44.

⁵⁰ Y I Iswarahadi, "Inter Mirifica: Dalam Semangat Konsili Vatikan II Memahami Dan Mengintegrasikan Media Komunikasi Sosial Dalam Karya Pastoral Gereja," *Jurnal Orientasi Baru* 22, no. 2 (2013): 111-124.

⁵¹ Florensia Imelda Seran, Soteris Seperuri Tanggul, and Benedikta Suryani, "'Omnia in Caritate': Model Pelayanan Pastoral Terhadap Orang Miskin Di Tengah Pandemi Covid-19," *Jurnal Pelayanan Pastoral* 3, no. 2 (2022): 105-112.

⁵² Yosef Keladu, Ignas Ledot, and Kris Ibu, "JOHN PRIOR, SVD, AND THE OPTION FOR THE MARGINALIZED IN MAUMERE," *Dei Verbum* 64, no. 2 (2023): 215-233.

halnya umat kristiani di tempat lain di dunia, merasa lebih aman dan nyaman di tengah ketakutan dan kecurigaan terhadap orang dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Gereja di Indonesia, terutama yang berada di wilayah perkotaan dan di daerah yang intoleran terhadap agama, cenderung mempertahankan komunitasnya dengan mengurangi interaksi sosial dengan umat non-Kristen. Ironisnya hal itu justru terjadi ketika mereka mengklaim diri sebagai berkah bagi dunia, namun pada saat yang sama mereka mengisolasi diri dari masyarakat luas.⁵³ Isolasi diri terjadi bukan hanya dengan umat yang non-Kristen, melainkan juga dengan sesama yang miskin karena mereka dianggap menambah berat beban Gereja.⁵⁴

Dalam menyusun reksa pastoral yang selaras dengan tanda-tanda zaman, ada lima tahapan yang mesti dilalui.⁵⁵ *Pertama*, pengamatan atas situasi, mencakup pemetaan masalah dan penentuan masalah pokok. *Kedua*, melakukan analisis sosial, yaitu mencari sebab kunci atas masalah pokok yang dialami. *Ketiga*, melakukan refleksi teologis-biblis, yaitu upaya melihat masalah pokok yang sudah dianalisis dalam terang Sabda Allah atau ajaran Gereja. *Keempat*, menetapkan tanggapan pastoral, mencakup penyusunan program, kegiatan, dan anggaran. *Kelima*, melaksanakan kegiatan pastoral yang efektif dan tepat sasaran. Metode kerja pastoral seperti ini mewarnai pelaksanaan sinode dari tingkat Komunitas Basis Gerejani (KBG), lingkungan/stasi, paroki, dan keuskupan.

Kepemimpinan pastoral tanda-tanda zaman mensyaratkan kepekaan terhadap masalah-masalah konkret yang menjadi bagian dari pergulatan hidup umat. Temuan masalah kemudian dianalisis untuk mengetahui sebab-sebab kuncinya, lalu direfleksikan dalam terang iman Kristen menurut ajaran Kitab Suci atau ajaran Gereja. Kemudian dalam terang inspirasi ajaran iman, Gereja coba merancang model tanggapan pastoral yang kontekstual terhadap persoalan yang ditemukan, melalui program dan kegiatan-kegiatan pastoral yang sesuai, entah sesuai dengan pokok permasalahan (analisis masalah) maupun sesuai dengan kapabilitas komunitas untuk menyelesaikannya (analisis kapasitas).

Kepemimpinan pastoral tanda-tanda zaman dilaksanakan dengan mengedepankan asas partisipatif dan kontekstual. Karya pastoral partisipatif adalah buah dari prinsip subsidiaritas. Secara praktis, prinsip subsidiaritas memberikan kesempatan kepada komunitas pada level kecil untuk menjalankan secara efektif dan efisien program tertentu tanpa harus didikte secara berlebihan oleh komunitas pada level yang lebih besar/tinggi. Dalam kehidupan menggereja, misalnya, keuskupan tidak boleh mengurus apa yang bisa dilaksanakan oleh kevikapan, kevikapan tidak boleh mencaplok tugas yang bisa dikerjakan

⁵³ Joas Adiprasetya, "The Good yet Missing Innkeeper and the Possibility of Open Ecclesiology" 14 (2018): 185-202.

⁵⁴ Daniel Susanto, "Menggumuli Teologi Pastoral," *Diskursus - Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara* 13, no. April (2014): 77-107.

⁵⁵ Benediktus Denar, *Mengapa Gereja (Harus!) Tolak Tambang?* (Maukere: Penerbit Ledalero, 2015).

oleh paroki, paroki tidak boleh mengambil alih pekerjaan wilayah, dan wilayah tidak boleh mengambil alih tugas yang bisa dikerjakan oleh KBG.⁵⁶

Karya pastoral yang efektif tidak hanya dijalankan dengan memberikan kesempatan kepada Umat Allah untuk berpartisipasi. Dimensi kontekstual menjadi hal yang urgen dalam pelaksanaan karya pastoral sehingga bisa menjawab kebutuhan umat dengan konteks tertentu. Menurut Steven Bevans, konteks mencakup empat hal penting.⁵⁷ *Pertama*, konteks mencakup pengalaman personal atau sosial yang mempengaruhi seseorang. *Kedua*, konteks mencakup kebudayaan. *Ketiga*, konteks meliputi lokasi sosial seseorang atau sekelompok orang. *Keempat*, konteks mencakup realitas sosial dalam kehidupan masyarakat yang ditandai oleh perubahan.

Karya pastoral kontekstual menjadikan konteks hidup umat sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan pastoral sehingga karya pastoral yang dijalankan bisa menjawab kebutuhan konkret umat. Karya pastoral yang berangkat dari konteks kehidupan umat membuat umat lebih bersemangat melibatkan diri secara aktif dalam pelaksanaannya, ketimbang harus memaksakan karya pastoral yang terkesan asing atau tidak berangkat dari konteks umat. Jadi, terdapat hubungan yang harmonis antara karya pastoral partisipatif dan karya pastoral kontekstual. Semakin kontekstual sebuah karya pastoral, partisipasi umat semakin tinggi.

Kepemimpinan Pastoral yang Berdiakonia terhadap Kaum Miskin

Prinsip-prinsip ASG menawarkan pedoman bagi Gereja untuk berani keluar dari kenyamanan pastoral liturgisentris atau altarsentris dan memberanikan diri untuk menyentuh realitas sosial dengan kompleksitas tantangan. Prinsip-prinsip ASG mempromosikan dimensi *ad extra* dari sinodalitas yang tampak secara nyata dalam karya-karya sosial Gereja. Karya pelayanan Gereja dengan orientasi pada kepedulian sosial adalah panggilan dari Tuhan dan menjadi bagian integral dari tradisi kekristenan.⁵⁸ Gereja menjadi sebuah persekutuan umat beriman yang mengemban tanggung jawab untuk "memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemerias-pemerias!" (Mzm. 72:4). Dalam hal ini, Gereja mengemban tugas sebagai agen perubahan dalam pelaksanaan karya misi dan pelayanan, khususnya yang berhubungan dengan masyarakat miskin.⁵⁹

⁵⁶ John Prior, "'Antara Monarki Dan Demokrasi: Melacak Jejak Laku Hierarki Gereja 40 Tahun Terakhir,'" in *Allah Menggugat Allah Menyembuhkan*, ed. Paul Budi Kleden, Otto Gusti Madung, and Anselmus Meo (Maumere: Penerbit Ledalero, 2012). 120.

⁵⁷ Stephen Bevans, *Model-Model Teologi Kontekstual* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2020). 5-10.

⁵⁸ Herry Susanto, "Panggilan Sosial Gereja Berdasarkan Pelayanan Yesus Dalam Lukas 4:18-19: Sebuah Upaya Merevitalisasi Pelayanan Gereja," *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 19, no. 1 (2020): 97-112.

⁵⁹ Jerry Pillay, "The Church as a Transformation and Change Agent," *HTS Theologiese Studies / Theological Studies* 73, no. 3 (2017): 1-12.

Karya pastoral diakonia dapat dipahami sebagai panggilan Gereja untuk menjangkau dan menyentuh realitas sosial hidup umat dalam tanda keadilan, solidaritas, dan perdamaian. Karya pastoral diakonia mengafirmasi definisi tentang keberadaan Gereja bukan hanya pada tataran otoritas sebagai institusi yang kaya akan ajaran magisterium, melainkan juga pada keterlibatan praksis dalam kehidupan umat beriman. Artinya, Gereja memiliki tanggung jawab sosial untuk mendukung pencapaian dan pemeliharaan suasana perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan bersama.⁶⁰

Solidaritas mengungkapkan mutu hidup beriman dan kesetiaan umat beriman kepada Yesus yang sudah terlebih dahulu bersolider dengan manusia yang berdosa demi pembebasan manusia dari perbudakan dosa. Pelaksanaan tugas diakonia adalah bentuk solidaritas dengan sesama yang menderita. Diakonia mengungkapkan eksistensi Gereja sebagai persekutuan para pengikut Yesus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani (bdk. Yoh. 13:34). Diakonia menjadikan Gereja mengemban tugas untuk menampilkan wajah Kristus yang sungguh berkorban dan melayani (bdk. Mrk. 10:45).

Dalam Katekismus Gereja Katolik, karya diakonia Gereja terdiri atas dua jenis.⁶¹ *Pertama*, karya diakonia yang berhubungan erat dengan kebutuhan rohani umat, seperti pengajaran, pemberian nasihat, penghiburan, pengampunan, dan kebesaran hati untuk memberikan pengampunan. *Kedua*, karya diakonia yang berkaitan dengan kebutuhan jasmani umat, seperti pemberian makanan kepada sesama yang lapar, pemberian tumpangan bagi tunawisma, pengenaan pakaian bagi mereka yang telanjang, kunjungan orang miskin dan tahanan serta penguburan orang meninggal.

Dua pembagian karya diakonia sebagaimana diuraikan dalam Katekismus Gereja Katolik adalah jenis karya diakonia karitatif yang memfokuskan perhatian pada usaha pemberian donasi langsung kepada kaum miskin dan menderita, baik secara jasmani maupun rohani, dengan tujuan agar mereka dapat tetap melangsungkan hidup. Meskipun demikian, ada beberapa pertimbangan lanjutan dalam pelaksanaan diakonia karitatif.

Pertama, diakonia karitatif tidak boleh menjadikan sesama yang miskin sebagai objek bantuan Gereja. Kekurangan hidup yang mereka alami tidak berimplikasi pada pengurangan identitas kemanusiaan mereka sebagai subjek yang mesti selalu dihargai. Secara etis, sesama yang miskin sudah sepatutnya mendapat perhatian khusus bukan saja karena mereka membutuhkan bantuan, melainkan juga terutama karena eksistensi mereka sebagai subjek yang mampu menobatkan Gereja: dari Gereja yang triumfalistik menuju Gereja yang melayani dan dialogal.⁶² Atas dasar itu, Gereja mesti memandang sesama yang miskin pertama-tama sebagai subjek teologis.

⁶⁰ Fibry Jati Nugroho, "Gereja Dan Kemiskinan: Diskursus Peran Gereja Di Tengah Kemiskinan," *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 3, no. 1 (2019): 100.

⁶¹ Yohanes Paulus II, "Katekismus Gereja Katolik (Catechism of the Catholic Church)," *The Church and Other Faiths* (1992). Art. 2447.

⁶² Otto Gusti Madung, "'Provokasi Kasih,'" in *Omnia in Caritate Lakukanlah Semua Dalam Kasih Kenangan Tahbisan Uskup Mgr. Siprianus Hormat Uskup Keuskupan Ruteng*, ed. Max Regus and Fidelis Den (Jakarta: Penerbit Obor, 2020). 161.

Kedua, diakonia karitatif tidak boleh dijadikan sebagai momen untuk mencari popularitas diri. Perlu diakui bahwa Gereja tidak memiliki banyak sumber daya material yang dibutuhkan untuk mengatasi kemiskinan. Dalam melaksanakan diakonia karitatif, Gereja biasanya merangkul para penderma. Sering terjadi bahwa para penderma tergoda untuk membanggakan diri karena sudah memberikan bantuan bagi orang miskin. Orang miskin dijadikan sebagai objek yang membantu pencapaian popularitas diri. Inilah yang perlu dicegah: diakonia karitatif tidak boleh jatuh pada kesombongan sosial.

Diakonia tidak hanya berurusan dengan usaha meningkatkan kesejahteraan materi saja, tetapi juga mencakup perubahan diri secara holistik. Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik *Centesimus Annus* mengingatkan, agar segala kegiatan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pencapaian kemakmuran, tetapi juga untuk merealisasikan solidaritas terhadap kaum miskin agar martabat mereka tetap terlindungi.⁶³ Perubahan diri sesama yang miskin secara utuh dan holistik menjadi tujuan pelaksanaan karya diakonia Gereja. Dukungan kondisi struktur sosial mendorong terwujudnya transformasi diri sesama yang miskin. Sesama yang miskin bukanlah orang yang malas. Mereka menderita akibat dari struktur yang tidak adil. Atas dasar itu, diakonia karitatif mesti dilengkapi dengan diakonia transformatif yang berciri struktural. Diakonia Gereja tidak cukup hanya dengan pelaksanaan agenda untuk memberdayakan ekonomi sesama yang miskin, tetapi juga mesti mengusahakan transformasi struktur agar lebih memihak pada kehidupan mereka.

Diakonia transformatif adalah salah satu bentuk peran publik Gereja. Diakonia transformatif adalah pengembangan misi pembebasan yang dilakukan Gereja dalam konfrontasi dengan realitas sosial untuk menyatakan keberpihakan terhadap orang miskin dan memperjuangkan hak-hak hidup orang miskin.⁶⁴ Perwujudan iman tampak secara nyata ketika Gereja terlibat aktif dalam mengkritisi dan membongkar struktur sosial-politik dan sosial-budaya yang menyebabkan mereka menderita. Artinya, definisi tentang eksistensi Gereja tidak mengacu pada otoritasnya sebagai institusi, melainkan pada keterlibatan praksis dalam keberpihakan dengan mereka yang menderita.⁶⁵

KESIMPULAN

Gagasan prinsip-prinsip ASG memberikan petunjuk pelaksanaan kepemimpinan pastoral kristiani secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan-tujuan pastoral yang sudah ditetapkan secara bersama. Dalam perspektif prinsip-prinsip ASG, kepemimpinan pastoral menekankan prinsip partisipasi semua umat beriman dalam pelaksanaan karya pastoral.

⁶³ Paus Yohanes Paulus II, *Centesimus Annus* (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Wali Gereja Indonesia, 1991).

⁶⁴ Benediktus Denar and Paulus Tolo, “Teologi Publik Dan Praksis Pengembangannya Dalam Pastoral Pariwisata Di Keuskupan Ruteng,” *Jurnal Alternatif Wacana Ilmiah Interkultural* 11, no. 2 (2022): 37–38.

⁶⁵ Benediktus Denar and Jean Loustar Jewadut, “Respons Gereja Terhadap Persoalan Feminisasi Migrasi Dalam Perspektif Teologi Publik,” *Jurnal Alternatif Wacana Ilmiah Interkultural* 12, no. 01 (2023): 1–18.

Seorang pemimpin, dalam hal ini kaum klerus, mesti mampu membangun komunikasi yang harmonis dengan semua umat beriman teristimewa dalam penetapan kegiatan-kegiatan pastoral. Selain itu, kepemimpinan pastoral dijalankan dengan keterlibatan aktif pemimpin pastoral dalam situasi konkret kehidupan umat. Dengan cara ini, seorang pemimpin pastoral akan mengetahui suka-duka kehidupan umat dan bisa menetapkan kebijakan pastoral yang kontekstual. Akhirnya, kepemimpinan pastoral tidak hanya berurusan dengan seputaran altar saja, tetapi harus menjangkau berbagai dimensi kehidupan umat. Dalam hal ini, relevanlah diskursus dan praktik kepemimpinan pastoral yang berdiakonia sebagaimana yang menjadi salah satu poin penting dalam gagasan tentang prinsip solidaritas dalam ASG. Prinsip-prinsip ASG mempromosikan dimensi *ad extra* dari sinodalitas kepemimpinan pastoral yang tampak secara nyata dalam karya-karya sosial Gereja.

Daftar Pustaka

- Adiprasetya, Joas. "The Good yet Missing Innkeeper and the Possibility of Open Ecclesiology" 14 (2018): 185–202.
- Akka, Yudit, and Orindevisa. "Penerapan Kepemimpinan Karismatik Dalam Meningkatkan Spiritualitas Pemuda GPSDI Jemaat Gratia Pattengko Kecamatan Tomoni Timur." *Skenoo: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 3, no. 1 (2023): 13–26.
- Bevans, Stephen. *Model-Model Teologi Kontekstual*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2020.
- Chandra, Xaverius. "Kebaikan Umum Dalam Ajaran Sosial Gereja." *Jurnal Filsafat Areté* 9, no. 1 (2020): 60–61.
- Chen, Martin. "'Gembala Berbau Domba: Refleksi Biblis-Teologis Tentang Gembala.'" In *Omnia in Caritate Lakukanlah Semua Dalam Kasih Kenangan Tahbisan Uskup Mgr. Siprianus Hormat Uskup Keuskupan Ruteng*, edited by Max Regus and Fidelis Den, 51–65. Jakarta: Penerbit Obor, 2020.
- Denar, Benediktus. *Mengapa Gereja (Harus!) Tolak Tambang?* Maumere: Penerbit Ledalero, 2015.
- Denar, Benediktus, and Jean Loustar Jewadut. "Respons Gereja Terhadap Persoalan Feminisasi Migrasi Dalam Perspektif Teologi Publik." *Jurnal Alternatif Wacana Ilmiah Interkultural* 12, no. 01 (2023): 1–18.
- Denar, Benediktus, and Paulus Tolo. "'Teologi Publik Dan Praksis Pengembangannya Dalam Pastoral Pariwisata Di Keuskupan Ruteng.'" *Jurnal Alternatif Wacana Ilmiah Interkultural* 11, no. 2 (2022): 37–38.
- Deo, Gahamanyi, and Zacharia Shitote. "Empowering Church Leaders in Leadership Effectiveness: A Transformational Approach in Anglican Church in Butare Rwanda, Africa." *European Modern Studies Journal* 7, no. 2 (2023): 326–333.
- Djone, Georges Nicolas, Catur Saputra, Nuh Gosianes, Makhtar N'diaye, and Renita Septiani. "God's Vision and Faith as the Basis of the Effectiveness of a Church Leader's Ministry." *Asian Journal of Philosophy and Religion* 1, no. 2 (2022): 73–80.
- Herman, Samuel, and Rinaldi Dharmawan. "Pemimpin Sejati Dengan Pola Kepemimpinan Yesus." *Skenoo : Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 4, no. 1 (2024): 24–36.
- II, Paus Yohanes Paulus. *Centesimus Annus*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan

- Penerangan Konferensi Wali Gereja Indonesia, 1991.
- — —. *Laborem Exercens*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Wali Gereja Indonesia, 1995.
- Imelda Seran, Florensia, Soteris Seperuri Tanggul, and Benedikta Suryani. “‘Omnia in Caritate’: Model Pelayanan Pastoral Terhadap Orang Miskin Di Tengah Pandemi Covid-19.” *Jurnal Pelayanan Pastoral* 3, no. 2 (2022): 105–112.
- Iswarahadi, Y I. “Inter Mirifica: Dalam Semangat Konsili Vatikan II Memahami Dan Mengintegrasikan Media Komunikasi Sosial Dalam Karya Pastoral Gereja.” *Jurnal Orientasi Baru* 22, no. 2 (2013): 111–124.
- Jehaut, Rikardus. “Membedah Diskursus Sinodalitas Paus Fransiskus Dan Relevansinya Terhadap Kehidupan Menggereja Di Indonesia.” *Jurnal Ledalero* 21, no. 105–120 (2022).
- Jewadut, Jean Loustar, and Fransiska Rosari Nirmala. “Peran Komunitas Basis Gerejawi Bagi Efektivitas Pelaksanaan Karya Pastoral Partisipatif Dan Kontekstual.” *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik* 23, no. 2 (2023): 10–26.
- Keladu, Yosef, Ignas Ledot, and Kris Ibu. “JOHN PRIOR, SVD, AND THE OPTION FOR THE MARGINALIZED IN MAUMERE.” *Dei Verbum* 64, no. 2 (2023): 215–233.
- Kieser, B. *Solidaritas 100 Tahun Ajaran Sosial Gereja*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian. *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*. Edited by Yosef Maria Florisan, Paul Budi Kleden, and Otto Gusti Madung. Maumere: Penerbit Ledalero, 2013.
- Komisi Teologi Internasional. *Sinodalitas Dalam Kehidupan Dan Misi Gereja. Seri Dokumen Gerejawi*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Wali Gereja Indonesia, 2022.
- Kristiyanto, A. Eddy. “Mengenal Konteks Ajaran Sosial Gereja Katolik Abad XIX.” *Orientasi Baru* 21, no. 1 (2012): 35–54.
- Madigan, Arthur R. “Some Observation on Evangelium Vitae.” In *Prophecy and Diplomacy, The Moral Doctrine of John Paul II*, edited by John J. Conley SJ - Joseph Koterski SJ, 306–312. New York: Fordham University Press, 1999.
- Madung, Otto Gusti. “Martabat Manusia Sebagai Basis Etis.” *Diskursus: Jurnal Filsafat dan Teologi Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara* 11, no. 2 (2012): 160–173.
- — —. “‘Provokasi Kasih.’” In *Omnia in Caritate Lakukanlah Semua Dalam Kasih Kenangan Tahbisan Uskup Mgr. Siprianus Hormat Uskup Keuskupan Ruteng*, edited by Max Regus and Fidelis Den. Jakarta: Penerbit Obor, 2020.
- Makiliuna, Maridina, Theresia Aryanti Mando Tato, Melita Mangar, and Yuliana Eni Yulianti. “Ajaran Sosial Gereja Melihat Kemiskinan Dan Keadilan Melalui Lensa Mater et Magistra.” In *Theos : Jurnal Pendidikan dan Theologi* 4, no. 2 (2024): 38–44.
- Manca, Silvester. “Kepemimpinan Pastoral Bercorak Pastor-Sentris Dalam Perspektif Teologi.” *Jurnal Alternatif Wacana Ilmiah Interkultural* 10, no. 1 (2021): 13–26.
- Nilamsari, Natalina. “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif.” *Wacana* 8, no. 2 (2014): 177–1828.
- Nugroho, Fibry Jati. “Gereja Dan Kemiskinan: Diskursus Peran Gereja Di Tengah

- Kemiskinan." *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 3, no. 1 (2019): 100.
- Panitia Sinode III Keuskupan Ruteng. *Dokumen Sinode III 2013-2015 Keuskupan Ruteng Pastoral Kontekstual Integral*. Yogyakarta: Penerbit asdaMEDIA, 2017.
- Paulus II, Yohanes. "Katekismus Gereja Katolik (Catechism of the Catholic Church)." *The Church and Other Faiths* (1992).
- Paus Fransiskus. "Ajaran Sosial Gereja Di Masa Pandemi." *Dokpen Kwi* (2020): 1-54.
- — —. *Evangelii Gaudium*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Wali Gereja Indonesia, 2014.
- Paus Yohanes Paulus II. *Redemptor Hominis*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Wali Gereja Indonesia, 1995.
- Pillay, Jerry. "The Church as a Transformation and Change Agent." *HTS Theologiese Studies / Theological Studies* 73, no. 3 (2017): 1-12.
- Prior, John. "'Antara Monarki Dan Demokrasi: Melacak Jejak Laku Hierarki Gereja 40 Tahun Terakhir.'" In *Allah Menggugat Allah Menyembuhkan*, edited by Paul Budi Kleden, Otto Gusti Madung, and Anselmus Meo. Maumere: Penerbit Ledalero, 2012.
- Susanto, Daniel. "Menggumuli Teologi Pastoral." *Diskursus - Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara* 13, no. April (2014): 77-107.
- Susanto, Herry. "Panggilan Sosial Gereja Berdasarkan Pelayanan Yesus Dalam Lukas 4:18-19: Sebuah Upaya Merevitalisasi Pelayanan Gereja." *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 19, no. 1 (2020): 97-112.
- Suseno, Frans-Magnis. *Gereja Berhadapan Dengan Ketidakadilan. Ajaran Sosial Gereja*. Jakarta, 1983.
- — —. "'Tinjauan Terhadap Buku Armada Riyanto, Katolisitas Dialogal: Ajaran Sosial Katolik.'" *Diskursus - Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara* 17, no. 137-139 (2014).
- Toron, Vinsensius Bawa, and Yohanes Marinus. "'Ajaran Sosial Gereja Tentang Membangun Keluhuran Martabat Manusia Sebagai Citra Allah.'" In *Veritate Lux Jurnal Ilmu Kateketik Pastoral Teologi, Pendidikan Antropologi, dan Budaya* 01, no. 01 (2018): 1-6.
- Vaismoradi, Mojtaba, Hannele Turunen, and Terese Bondas. "Content Analysis and Thematic Analysis: Implications for Conducting a Qualitative Descriptive Study." *Nursing and Health Sciences* 15, no. 3 (2013): 398-405.
- Whitehead, Evelyn Eaton. "'Tanggung Jawab Dalam Imamat: Kisah Sebuah Pelayanan Yang Sedang Mekar.'" In *Imam Masa Kini*, edited by Donald J. Goergen. Maumere: Penerbit Ledalero, 2003.
- Wiratama, I Wayan Agus. "Signifikansi Paradigma Kepemimpinan Intergenerasional Menurut Gary L. McIntosh Bagi Revitalisasi Pelayanan Tim Kemajelisan Gereja." *Skenoo : Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 4, no. 1 (2024): 51-72.
- Yurmaini, Erliyanti, Dewi Sundari, and Khairil Anshari. "Pendekatan Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif." *Hibrul Ulama: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keislaman* 6, no. 1 (2024): 83-90.